



PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Avisa Nova Fauzistika  
NIM : 20150610293  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP  
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI  
KABUPATEN SLEMAN  
Pembimbing : Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 7%.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 11-2-2019  
yang melaksanakan pengecekan

Muh Natsir



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 November 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/11151/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
DIY

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 288/A.4-II/XI/2018  
Tanggal : 21 November 2018  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SLEMAN" kepada:

Nama : AVISSA NOVA FAUZISTIKA  
NIM : 20150610293  
No.HP/Identitas : 083867733025/3404134311970001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY  
Waktu Penelitian : 21 November 2018 s.d 30 Januari 2018

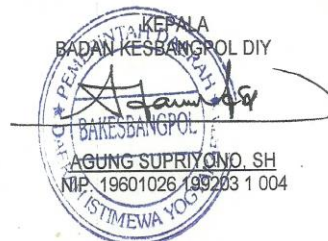
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Telepon (0274) 885147, Faksimili (0274) 885036  
Website : [www.nakertrans.pemda-diy.go.id](http://www.nakertrans.pemda-diy.go.id); Email : [disnakertransdiy@yahoo.com](mailto:disnakertransdiy@yahoo.com)  
YOGYAKARTA  
Kode Pos 55282

Yogyakarta, 9 Januari 2019

Nomor : 070/00181  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Selesai Penelitian.

Kepada Yth :  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta.  
di -

YOGYAKARTA.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas nama :

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	AVISSA NOVA FAUZISTIKA	20150610293	Ilmu Hukum

Maka dengan ini kami sampaikan, bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY pada tanggal 21 Desember 2018

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SUKARTININGSIH, SE  
No. 0225 198603 2 005.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon (0274) 551136, 551137, Pesawat 20-21 Fax (0274) 551137

**TANDA TERIMA**  
**PENYERAHAN DOKUMEN HASIL PENELITIAN/PENGABDIAN**

Dengan ini,

Nama : AVISSA HOVA FAUZISTITA  
No. Identitas/NIM : 20150610293  
Jurusan/Prodi : HUKUM / ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Universitas/Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
Bentuk dokumen : Softfile / Hardfile  
Judul Penelitian : PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN  
UPAH KUTIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SELATAN

Telah menyerahkan dokumen hasil penelitian/pengabdian sebagai bentuk kewajiban peneliti untuk melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian/pengabdian kepada Gubernur DIY c.q Kepala Badan Kesbangpol DIY setelah menyelesaikan penelitian/pengabdian dimaksud (Sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian).

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima,

( R. TRAMIRAPR... )



Mengetahui,

Yogyakarta, 28 JANUARI 2019

Yang Menyerahkan,

( AVISSA HOVA F. )



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 3751 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.  
Menunjuk : Surat dari Ket. Prodi Fak. Hukum UMY  
Nomo : 288/A.4-II/XI/2018  
Hal : Ijin Penelitian  
Tanggal : 21 Nopember 2018

MENGIZINKAN :

Kepada :  
Nama : AVISSA NOVA FAUZISTIKA  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20150610293  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul  
Alamat Rumah : Sebayu Triharjo Sleman  
No. Telp / HP : 083867733025  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH  
MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SLEMAN**  
Lokasi : Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 30 Nopember 2018 s/d 01 Maret 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 30 Nopember 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman
3. Yang Bersangkutan





**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 868429, 868405, ext. 1299 Faksimile (0274) 868429  
Website: [www.disnaker.slemankab.go.id](http://www.disnaker.slemankab.go.id), E-mail: [disnaker@slemankab.go.id](mailto:disnaker@slemankab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 560/0021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

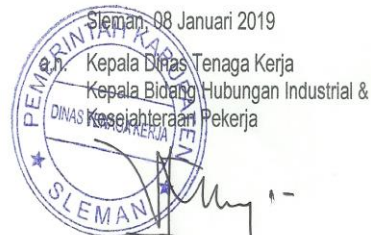
1. Nama : Mohamad Umar Sukarno, S.Km.M.Si.
2. NIP : 19650712 198803 1 019
3. Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tingkat I, III/ d
4. Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan  
Pekerja

dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : Avissa Nova Fauzistika
2. Fakultas : S1 / FH
3. Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. NIM : 20150610293
5. Judul Skripsi : PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP UPAH MINIMUM KABUPATEN DI  
KABUPATEN SLEMAN

telah melakukan penelitian tentang ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sleman, 08 Januari 2019  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kepala Bidang Hubungan Industrial &  
Kesejahteraan Pekerja  
M. Umar Sukarno, S.Km., M.Si.  
Penata muda Tingkat I, III/ d  
NIP 19650712 198803 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

**TANDA TERIMA**

No : 33  
Penerima Hasil Penelitian : 24 Januari 2019  
Nama : Avissa Nova Fauzistika  
Dari : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
NIM : 20150610293  
Perihal : Penyerahan Hasil Penelitian  
Judul Penelitian : PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH  
MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SLEMAN

Sleman, 24 Januari 2019





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **223/KEP/2017**  
TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2018

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 76);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 02 NOVEMBER 2017




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
  3. Dirjen PUOD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
  4. Pimpinan DPRD DIY;
  5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-DIY;
  6. Bupati/Walikota se-DIY;
  7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
  8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
  9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
  10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
  11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
  12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul;
  13. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 223 / KCP / 2019  
TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2018

No.	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota
1.	Kota Yogyakarta	Rp.1.709.150,00
2.	Kabupaten Sleman	Rp.1.574.550,00
3.	Kabupaten Bantul	Rp.1.527.150,00
4.	Kabupaten Kulon Progo	Rp.1.493.250,00
5.	Kabupaten Gunungkidul	Rp.1.454.200,00

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
H. MENGKU BUWONO X



**PERUBAHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2018**

Kabupaten : SLEMAN  
 Seksi : HUBUNGAN INDUSTRIAL

No	Tahun	UMK (Rp)	KHL (Rp)	Prosentase UMK/KHL (%)	Inflasi (%)	Prosentase Kenaikan UMK (%)
1.	2016	1.338.000,-	1.356.602,-	98,63	3,31	8,9
2.	2017	1.448.385,-	1.351.117,-	107,19	3,05	9,3
3.	2018	1.574.550,-	1.436.681,-	109,59	3,72	9,1

Keterangan:

1. UMK : Upah Minimum Kabupaten
2. KHL : Kebutuhan Hidup Layak

Sleman, September 2018  
 an. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman  
 Plt Kabid Hubungan Industrial



DATA OBYEK PENGAWASAN

Triwulan : III TAHUN 2018  
 Provinsi : D.I.YOGYAKARTA  
 Kode : K2  
 Seksi : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

No	KAB/ KOTA	JUMLAH PERUSAHAAN	Jumlah Tenaga Kerja				Kategori Perusahaan			Status Perusahaan				PERANGKAT HUB. INDUSTRIAL				Penghargaan K3 yg dimiliki Perusahaan	
			WNI		WNA		Kecil (<25 Orang)	Sedang (26-99 Orang)	Besar (>100 Orang)	Swasta	PMDN	PMA	JOINT VENT	Lain lain	PP	PKB	SP		Lemb Tipe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	DIY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	KOTA	1.677	42.522	25.304	32	10	1.099	391	187	1.402	185	71	7	12	450	139	234	1	6
3	SLEMAN	1.611	67.462	37.983	105	38	939	448	224	1.245	166	94	94	12	481	165	48	1	0
4	BANTUL	698	22570	21552	111	14	413	216	69	642	31	16	7	2	31	2	2	1	1
5	K.PROGO	307	4428	4266	3	0	244	51	12	292	11	4	0	0	30	15	1	1	1
6	G.KIDUL	295	4226	1515	1	0	230	57	8	266	27	2	0	0	3	1	1	1	1
	Jumlah:	4.586	141.208	90.620	252	62	2.925	1.163	500	3.847	420	187	108	26	995	322	285	6	6

KETERANGAN :

- 1 : Nomor urut
- 2 : KLUJ 1 s.d 0
- 3 : Jumlah Perusahaan
- 4 : Jumlah TK WNI
- 5 : Jumlah TK WNA
- 6 : Kategori Perush. Kecil
- 7 : Kategori Perush. Sedang
- 8 : Kategori Perush. Besar
- 9 : Status Perusahaan Swasta
- 10 : Status perusahaan PMDN
- 11 : Status perusahaan PMA
12. Status Perush. Joint Venture
13. Perangkat Hub. Industrial (PP)
14. Perangkat Hub. Industrial (PKB)
15. Perangkat Hub. Industrial (SP)
16. Perangkat Hub. Industrial (Lembaga Tripartit)
17. Penghargaan K3 yg dimiliki Perusahaan

Yogyakarta, September 2018  
 Disdiknakertrans DIY  
 Kepala Bidang Hubungan PTK  
 DISKAMENKAWAS  
 NIP. 197304231997031001

**DATA PELANGARAN NORMA KERJA**

10  
 Triwulan : III  
 Provinsi : D.I.YOGYAKARTA  
 Kode : K9a  
 Seksi : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

No. Kab/Kota	Jumlah Perishor	WLK	WKWI	TKA	TKI	UMP	Upat Lmbur	Jenis pelanggaran Normaketenagakerjaan									
								THR	THM	C.H	Had	PKB	P4D/P4P	PW BB	PW ITK	PDS Upat	PDS Prog
1 KOTA	291	53	9	1	23	18	2	3	14	12	39	43	59	7	8		
2 SLEMAN	381	94	7	2	31	10	4	1	49	21	27	39	61	5	30		
3 BANTUL	183	89	7	7	11	4	1	25	10	27	6	18	1	10			
4 K.PROGO	85	21	20	4	5	3	2	10	3	12	4	5	5	13			
5 G.KIDUL	19	4	1	1	2	1	1	1	4	4	1	1	1	5			
<b>Jumlah</b>	<b>969</b>	<b>368</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>72</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>99</b>	<b>46</b>	<b>109</b>	<b>93</b>	<b>144</b>	<b>13</b>	<b>66</b>		

Keterangan :

- 1 WLK : Wajib Laporketenagakerjaan
- 2 WKWI : Waktu Kerja Waktu Istirahat
- 3 TKA : Tenaga Kerja Asing
- 4 TKI : Tenaga Kerja Indonesia
- 5 UMP : Upah Minimum Provinsi
- 6 THR : Tunjangan Hari Raya
- 7 PP/PKB : Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama
- 8 P4D/P4P : Pelaksanaan Putusan P4D/P4P
- 9 PWBD : Perusahaan Wajib Belum Daftar
- 10 PDSTK : Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja

September 2018  
 Kepala Disnakertrans DIY  
 Kepala Bidang HI dan PTK  
**DISNAKERTRANS**  
 Ardyanto Wibowo, SH.MHum  
 NIP. 197309231997031001

**KEGIATAN PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN**

Tujuan : III  
 Provinsi : D.I. YOGYAKARTA  
 Kode : K5  
 Seksi : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

No	DATA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN		KEGIATAN PEMERIKSAAN				KEGIATAN PEMBINAAN		KETERANGAN
	JUMLAH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	PERTAMA	BERKALA	ULANG	KHUSUS	NP. I	NP. II	
1	20	Terampil 1. Pelaksana 2. Pelaksana Lanj 3. Penyelia	595	478	6	103	511	5	
		Ahli 1. Pertama 2. Muda 3. Madya							
	JUMLAH	20	595	478	6	103	511	5	

Keterangan :

- 1 NP. I : Nota Pemeriksaan I
- 2 NP. II : Nota Pemeriksaan II

Yogyakarta, September 2013  
 Disnakertrans DIY  
 Kepala Bidang PPTK

DISNAKERTRANS YOGYAKARTA  
 ANP. 197304199703 1 001

DATA PENYIDIKAN NORMA KETENAGAKERJAAN

12  
 : III  
 : D.I.YOGYAKARTA  
 : K10  
 : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

No	Kab/ Kota	Jml Perush. Melanggar	Jml Perish. Diajukan BAP	Penghentian Penyidikan	PUTUSAN		Kete- ngan
					Denda	Kurung	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOTA	291	1	-	1	-	Rp. 5.000.000.000 Subsider 4 hari kurungan penjara
2	SLEMAN	381	-	-	-	-	-
3	BANTUL	183	2	-	2	-	-
4	K-PROGO	85	-	-	-	-	-
5	G Kidul	19	-	-	-	-	-
JUMLAH		959	3	-	3	-	-

September 2018  
 Kepala Dinas Ketrans DIY  
 Kepala Bidang Hubungan PTK  
**DISNAKERTRANS**  
 Ariyanto Winarto, SH.MHum  
 NIP: 197308231997031001

LUAS WILAYAH TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2018

Kabupaten : SLEMAN

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SLEMAN

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Kepadatan (Km <sup>2</sup> )
		Desa	Dusun		
1	Moyudan	4	65	2.762	1,216
2	Godean	7	57	2.684	2,133
3	Minggir	5	68	2.727	1,267
4	Gamping	5	59	2.925	2,249
5	Seyegan	5	67	2.663	1,583
6	Sleman	5	83	3.132	1,774
7	Ngaglik	6	87	3.852	1,712
8	Mlati	5	74	2.852	2,351
9	Tempel	8	98	3.249	1,428
10	Turi	4	54	4.309	0,755
11	Prambanan	6	68	4.135	1,064
12	Kalasan	4	80	3.584	1,524
13	Berbah	4	58	2.299	1,750
14	Ngemplak	5	82	3.571	1,243
15	Pakem	5	61	4.384	0,701
16	Depok	3	58	3.555	3,069



17	Cangkringan	5	73	4.799	0,549
	Jumlah	86	1.212	57.482	1,479

Keterangan :

1. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman

Sleman, September 2018

an. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman

Plt. Kabid Hubungan Industrial



Moh. Umar Sukarno, S.Km, M.Si

NIP. 196507121988031019